

Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Sandi G. Muskanan¹, Thobias E.D. Tomasowa²

^{1,2)} Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Kupang

Abstract

This study aims is to examine the effect of local government spending on education and health to the Human Development Index (HDI) at Timor Tengah Selatan regency, both partially and simultaneously. The variables which used in this study are Regional Government Spending in Education (X1), Regional Government Spending in Health (X2) and Human Development Index (Y). The data used in this paper are quantitative from secondary sources, namely The Central Statistics Office and The Regional Financial and Asset Management Office, Timor Tengah Selatan regency. Data analysis using linear regression analysis using t test (partial) to test the hypotheses 1 and 2 and F test (simultaneous) to test the hypothesis 3. The T test results for the hypotheses 1 and 2 show significance values of 0,000 and 0.006, which means H1 and H2 are accepted. The F test results to test hypothesis 3 show a significance value of 0,000, which means H3 is accepted. The conclusion of the process that can be drawn is that government spending in the education and health sectors both partially and simultaneously has a positive effect to the Human Development Index at Timor Tengah Selatan Regency.

Keywords: Regional Government Spending in Education and Health, Human Development Index.

PENDAHULUAN

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan di suatu wilayah. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak (BPS, 2014)

Rendahnya kualitas hidup masyarakat masih menjadi masalah di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2018, angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 61,58 yang diartikan rendah jika dibandingkan dengan wilayah pada urutan ke 16 dari 22 kabupaten/ kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kinerja pembangunan manusia di Kabupaten TTS belum mencapai tingkat yang optimal. Dalam rangka peningkatan kualitas

hidup masyarakat yang tercermin dari angka IPM, dapat dilakukan melalui instrumen kebijakan fiskal dengan penyediaan pelayanan dasar yang dilaksanakan melalui mekanisme anggaran. Pemerintah harus cermat dalam mengalokasikan belanja daerah terhadap pembangunan pada sektor-sektor pendukung yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia misalnya belanja daerah untuk bidang pendidikan dan kesehatan.

Sektor pendidikan dan kesehatan merupakan dua komponen pelayanan dasar kepada masyarakat yang memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat yang terdidik dan sehat merupakan modal utama dalam pembangunan. Penelitian yang dilakukan oleh Andiny dan Sari (2018) menyatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia baik secara parsial maupun simultan secara empiris.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1) Apakah belanja pemerintah daerah bidang pendidikan berpengaruh terhadap Indeks

Pembangunan Manusia; 2) Apakah belanja pemerintah daerah bidang kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia; 3) Apakah belanja pemerintah daerah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah daerah bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia; 2) untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah daerah bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia; 3) untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah daerah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian Merang dkk (2016) menyatakan bahwa belanja pemerintah daerah bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian yang Sal Diba dkk (2018) menunjukkan bahwa hasil bahwa pengeluaran pemerintah daerah bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Lawrence dkk (2017) menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pendidikan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu diatas maka hipotesis penelitian dinyatakan sebagai berikut:

H₁: Diduga Belanja Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

H₂: Diduga Belanja Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

H₃: Diduga Belanja Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Kesehatan secara simultan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

METODE

Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi yang berbentuk angka (Sugiyono,2016).

Variabel yang diteliti dan Indikator dari variabel adalah:

1. Belanja Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan (X1) adalah besarnya realisasi belanja yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan di bidang pendidikan dan dinyatakan dalam satuan mata uang rupiah.
2. Belanja Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan (X2) adalah besarnya realisasi belanja yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan di bidang kesehatan dan dinyatakan dalam satuan mata uang rupiah.
3. Indeks Pembangunan Manusia (Y) adalah ukuran yang digunakan untuk melihat capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia merupakan angka komposit yang dihitung oleh BPS berdasarkan formulasi yang ditetapkan UNDP. Indeks Pembangunan Manusia dinyatakan dalam bentuk angka numerik yang berkisar dari 0 sampai dengan 100.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data-data yang dikumpulkan berupa Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan dan organisasi tahun 2010-2017 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan publikasi angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2010-2017 dari Badan Pusat Statistik.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Tahapan ini meliputi beberapa pengujian sebelumnya yaitu 1) Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Untuk mendeteksi normalitas data, pada penelitian ini akan dilakukan uji statistik *non-parametrik Kolmogorov Smirnov Tes (K-S)*. Apabila nilai probabilitas signifikan $K-S > 0,05$ maka data berdistribusi normal; 2) Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Hasil perhitungan nilai $VIF < 10$, maka model regresi dikatakan baik dan tidak terjadi gejala multikolinieritas; 3) Uji Autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi di mana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri; 4) Uji Heteroskedastisitas untuk menguji terjadinya perbedaan varians residual suatu pengamatan ke periode pengamatan yang lain (Sujarweni, 2018).

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen (Bahri, 2018).

Uji t digunakan untuk menguji Hipotesis 1 dan Hipotesis 2. Kriteria pengambilan keputusan untuk uji t adalah Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima Atau Jika $Sig. > 0,05$, maka H_0 diterima. Uji F digunakan untuk menguji Hipotesis 3. Kriteria pengambilan keputusan untuk uji F adalah Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima Atau Jika $Sig. > 0,05$, maka H_0 diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji hipotesis 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji t Hipotesis 1 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	48.849	.804		60.751	.000
BELANJA PEMDA BIDANG PENDIDIKAN	.030	.002	.981	12.489	.000

a. Dependent Variable: INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan hasil bahwa nilai t-hitung sebesar 12,489 lebih besar dari t-tabel sebesar 2,57058 ($12,489 > 2,57058$). Hal ini mengartikan terdapat berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil yang positif ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Belanja Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai signifikansi variabel Belanja Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan sebesar 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Belanja Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka dinyatakan H_1 diterima yang artinya Belanja Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan berpengaruh positif

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Peningkatan belanja pemerintah pada bidang pendidikan maka dapat meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang Merang dkk (2016) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini memperkuat teori yang ada bahwa Belanja Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia sehingga teori ini semakin layak digunakan untuk memprediksi angka Indeks Pembangunan Manusia.

Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal tersebut tercantum dalam Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hasil pengujian hipotesis 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji t Hipotesis 2 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	55.742	.806		69.119	.000
BELANJA PEMDA BIDANG KESEHATAN	.033	.008	.861	4.153	.006

a. Dependent Variable: INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan hasil Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 4,153 lebih besar dari t-tabel sebesar 2,57058 ($4,153 > 2,57058$). Hal ini mengartikan terdapat berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil yang positif ini menunjukkan bahwa setiap

peningkatan variabel Belanja Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai signifikansi variabel Belanja Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan sebesar 0,006 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Belanja Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka dinyatakan H_2 diterima yang artinya Belanja Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sal Diba (2018) dimana menunjukkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara pada bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini memperkuat teori yang ada bahwa Belanja Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia sehingga teori ini semakin layak digunakan untuk memprediksi angka Indeks Pembangunan Manusia.

Alokasi belanja pemerintah daerah untuk bidang kesehatan dapat digunakan untuk menyediakan tenaga kesehatan yang cukup dan kompeten pada fasilitas kesehatan yang dikelola pemerintah kabupaten. Selain itu dapat juga digunakan untuk pembangunan fasilitas kesehatan yang tentu diharapkan dapat memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dapat dilihat dari meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil uji hipotesis 3 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji F ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	23.112	2	11.556	220.940	.000 ^a
Residual	.262	5	.052		
Total	23.373	7			

a. Predictors: (Constant), BELANJA PEMDA BIDANG KESEHATAN, BELANJA PEMDA BIDANG PENDIDIKAN

b. Dependent Variable: INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Berdasarkan tabel 3 diatas, menunjukkan hasil bahwa nilai F-hitung sebesar 220,940

lebih besar dari F-tabel sebesar 5,79 (220,940 > 5,79). Nilai F-hitung sebesar 220,940 menunjukkan bahwa terdapat berpengaruh positif antara variabel Belanja Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil yang positif ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Belanja Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Kesehatan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai signifikansi variabel Belanja Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Kesehatan sebesar 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Belanja Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka dinyatakan bahwa H_3 diterima yang artinya Belanja Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Kesehatan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Untuk memiliki tingkat pembangunan manusia yang baik pemerintah tentunya perlu berinvestasi pada bidang pendidikan dan kesehatan. Investasi dalam bentuk pengeluaran untuk pembangunan pada kedua sektor pelayanan dasar ini merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pada kedua sektor tersebut dapat membuka semakin banyak akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Semakin banyak masyarakat yang terdidik dan sehat maka semakin baik kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari angka Indeks Pembangunan Manusia yang semakin meningkat.

Hasil ini mendukung penelitian Lawrence (2017) menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pendidikan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini memperkuat teori yang ada bahwa Belanja Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia sehingga teori ini semakin layak digunakan untuk memprediksi angka Indeks Pembangunan Manusia.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, maka kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan hasil bahwa Belanja Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan secara parsial berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan hasil bahwa Belanja Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan secara parsial berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Hasil pengujian hipotesis 3 menggunakan uji F menunjukkan hasil bahwa Belanja Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Kesehatan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, untuk peningkatan kualitas Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan maka disarankan diharapkan meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan disebabkan dapat meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Syaiful. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: ANDI
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Katalog Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru). 2014. Badan Pusat Statistik
- Katalog Indeks Pembangunan Manusia. 2012. Badan Pusat Statistik
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Mulyana, Budi. 2010. *Modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Nordiawan, Deddi ddk. 2012. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Politeknik Negeri Kupang. 2013. *Pedoman Akademik*
- Ratmono, Dwi., dan Mahfud Solihin. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Santosa, Purbayu Budi. 2005. *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS*. Yogyakarta: ANDI
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS
- Sunyoto, Danang. 2011. *Praktik SPSS untuk Kasus*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Suryabrata, Sumadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Thodaro, Michael P. & Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Thodaro, Michael P. & Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Skripsi
- Aquariansyah, Febri. 2018. *Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2016 dalam Persepektif Ekonomi Islam*.
- Wahid, Bilal A. 2012. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pertumbuhan Ekonomi di Makassar periode 1996-2010*.
- Winarti, Astri. 2014. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 1992-2012*.
- Jurnal
- Alison Jeackline Lawrence Heja, Agnes Lopian dan Imelda Lajuck. 2017. *Pengaruh*

- Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara.* Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 17 No. 01 Tahun 2017.
- Merang Kahang, Muhammad Saleh dan Rachmad Budi Suharto. 2016. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur.* FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Volume 18, (2), 2016.
- Muliza, T. Zulham dan Chenny Seftarita. 2017. *Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Aceh.* Jurnal Perspektif Ekonomika Darussalam Volume 3 Nomor 1, Maret 2017.
- Puti Andiny dan Merlindiana Gus Puja Sari. 2018. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Langsa.* Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 2, No. 2 Oktober 2018.
- Sal Diba Susen Pake, George M.V Kawung dan Antonius Y. Luntungan. 2018. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Utara.* Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No. 04 Tahun 2018.
- Internet
Belanja Daerah dan Perbaikan Pelayanan Publik: Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Kajian-Belanja-Daerah-dan-Perbaikan-Pelayanan-Publik-EPIKD.pdf>
- Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten TTS tahun 2010-2017. Badan Pusat Statistik.
<https://ipm.bps.go.id/data/kabkot/metode/baru/5304>
- Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTT tahun 2010-2017. Badan Pusat Statistik.
<https://ipm.bps.go.id/data/provinsi/metode/baru/5300>